

BAB IV

UPAYA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA JEPANG DI ACEH

Melihat dampak akibat gempa dan tsunami yang melanda Aceh, kejadian ini langsung menarik perhatian dunia. Banyak negara yang menawarkan bantuan kepada Indonesia, tak terkecuali Jepang. Sebagai negara yang memiliki nasib yang sama dengan Indonesia dan memiliki manajemen bencana yang baik, bantuan yang diberikan oleh Jepang sangat berguna untuk Indonesia untuk memulihkan negara ini lagi. Tidak hanya memberikan bantuan barang, jasa, dan bantuan kemanusiaan, Jepang juga memberikan ilmu kepada Indonesia yang berkaitan dengan bencana. Bantuan yang diberikan oleh Jepang terbagi kedalam beberapa tahapan atau fase, yaitu: bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

A. Keterlibatan Bantuan Jepang dalam Upaya Penanggulangan bencana di Aceh

1. Tahap Bantuan Darurat

Sejak 3 bulan awal, tak kurang dari 24 jam setelah tsunami Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui telepon dan telegram menyampaikan ucapan belasungkawa. Simpati Negara Jepang kepada Indonesia yang sedang tertimpa musibah ini besar dan menawarkan tawaran bantuan langsung. Sehari setelah tsunami pada tanggal 27 Desember 2004, Pemerintah Jepang segera mengambil langkah untuk memberikan dukungan kepada rakyat Aceh.

Dukungan itu antara lain berupa pengiriman Tim Medis Darurat Jepang gelombang pertama yang terdiri dari 4 dokter dan 7 orang perawat yang membawa obat-obatan dan *Japanese Self-Defense Forces* (JSDF) yang menugaskan 970 personil JSDF untuk mendukung berbagai operasi pertolongan dengan menyediakan 3 kapal, 2 hovercraft, 5 helikopter dan 2 pesawat C-130H. Jasa angkut udara ini membawa barang dan peralatan yang diperlukan seperti tenda, pembangkit tenaga listrik (*generator*), selimut, tikar

tidur, penjernih air, tanki dan jerigen air minum untuk mendukung tindakan pencegahan medis atau epidemic di Aceh. Tim ini bertugas membangun rumah sakit lapangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terluka, dikarenakan hal inilah yang pertama sekali dibutuhkan bagi para korban yang terkena bencana, operasi ini di berinama *Emergency Respons*. Disaat yang bersamaan juga, Pemerintah Jepang mengirimkan tim survei ke Aceh untuk mengumpulkan informasi demi mempelajari kemungkinan kerja sama pada masa tanggap darurat ini.

Pada 28 Desember 2004, Pemerintah Jepang mengumumkan bantuan darurat yang berisikan Makanan dan Non-Makanan atas koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah dan perusahaan swasta di Jepang. Salah satunya Pemerintah Jepang melalui LSM Jepang yang bernama *Peace Winds Japan* telah mendistribusikan barang bantuan berjumlah 13 juta Yen atau sekitar US\$ 120.000, berupa air minum mineral, makanan, minyak goreng dan keperluan pangan lainnya.

Tabel 4.1 Jenis Bantuan tanggap darurat yang diberikan Jepang

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Japanese Self-Defense Force (JSDF)	970 personil
2	Tenaga Ahli Kesehatan	64 personil
3	Helikopter	5
4	Kapal	3
5	Pesawat C-130H	2
6	Hovercraft	2
7	Instalasi Studio Radio	1

(Source: (BRR, 2015))

Selanjutnya dalam menanggapi terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Jepang memberikan Bantuan Darurat *in Natura* dan dalam bentuk bantuan hibah finansial ini menjadi beberapa bagian, pertama bantuan makanan dan Non-makanan seperti yang sudah di jelaskan diatas, kedua Bantuan Hibah Darurat senilai US\$ 1,5 juta yang diberikan

langsung kepada pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai bantuan darurat dengan pertukaran nota verbal. Ketiga Bantuan Darurat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada tanggal 1 Januari 2005, senilai US\$ 146 juta telah diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Jepang juga menyalurkan dana sebesar US\$ 250 juta untuk disalurkan melalui organisasi-organisasi internasional yang relevan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi operasi bantuan darurat di Nanggroe Aceh Darussalam. Kelima, bantuan hibah untuk Langkah Pemulihan senilai US\$ 40 juta melalui *Japanese Trust Fund* di *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank* (Bank Dunia) untuk membiayai langkah-langkah pemulihan. Dan keenam, pada tanggal 3 Februari Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah *Grass-roots* untuk mendukung kegiatan medis yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah berupa penyelenggaraan proyek klinik berjalan di Kota Banda Aceh dan 7 kabupaten sekitarnya senilai US\$ 343.439. Total bantuan darurat *in Natura* dan bantuan hibah finansial yang diberikan oleh Pemerintah Jepang sebesar US\$ 500 juta.

Pada 8 Januari 2005, Pemerintah Jepang sekali lagi mengirim Tim Medis Darurat gelombang dua ke Aceh untuk tinggal selama dua minggu. Tugas tim kedua ini adalah untuk mengambil-alih tugas tim pertama dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan merawat yang terluka. Pada 18 Januari 2005, Pemerintah Jepang mengirim tim ketiga. Tugas tim ini bukan saja mengobati yang terluka tetapi juga memberi kerja sama teknik dalam hal sanitasi masyarakat dan memperhatikan penyakit- penyakit menular. Pada Januari 2005 saja, sebanyak 64 personel kesehatan (dokter, perawat, ahli penyakit menular) dikirim dalam tiga gelombang dan melayani 2.758 orang pasien korban bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan dukungan peralatan kesehatan senilai ¥ 15 juta atau sekitar US\$ 141.000.

Pemerintah Jepang menanggapi hal ini sebagai bencana yang sangat besar dan sadar akan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi kebutuhan kritis dan tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir kerugian suatu negara dari bidang ekonomi hingga korban jiwa. Maka dari itu pada tanggal 18 sampai 22 Januari 2005, di Kobe, Hyogo, Jepang, PBB mengadakan Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana atau “*Disaster Reduction*” yang mengadopsi Kerangka Aksi saat itu 2005-2015. Lebih dari 4000 peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk perwakilan dari pemerintah sebanyak 168, 78 badan khusus PBB dan organisasi pengamat, 161 organisasi non-pemerintah, dan 562 jurnalis dari 154 media. Forum publik ini menarik lebih dari 40.000 pengunjung.

Hasil dari konferensi ini adalah mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo yang digunakan dari tahun 2005 sampai 2015 atau “*Framework for Action*” yang berarti kerangka kerja untuk tindakan selanjutnya membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana yang tertulis sebanyak 24 halaman, yang disetujui oleh semua negara anggota, yang menguraikan tekad para anggota untuk mengejar “Pengurangan kerugian besar akibat bencana, dalam kehidupan dan dalam aset sosial, ekonomi dan lingkungan dari masyarakat dan negara demi target pada tahun 2015”. Kerangka kerja menguraikan pertimbangan umum dan kegiatan utama dalam lima bidang berikut, yang diidentifikasi sebagai prioritas untuk 2005-2015:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana adalah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk implementasi.
2. Mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan.
4. Mengurangi faktor risiko yang mendasarinya.
5. Memperkuat kesiap siagaan bencana untuk respon yang efektif di semua tingkatan.

Langkah lainnya, pemerintah Jepang juga mengirimkan Tim Pelopor Radio Suara Aceh (*Voice of Aceh*) yang dikirim ke Banda Aceh sehari setelah gempa dan tsunami untuk memasang instalasi studio dan membagikan pesawat radio ke tenda-tenda darurat. Tim teknis diberangkatkan untuk menangani aspek teknis stasiun radio, dikarenakan dasyatnya bencana yang mengakibatkan putusnya seluruh alat komunikasi di Aceh. Tim ini tidak hanya bertanggung jawab atas program radio, tetapi juga atas perekrutan sukarelawan untuk penyiar, wartawan, dan staf administrasi, serta membuat jaringan untuk kelancaran komunikasi dengan stasiun radio lain di Indonesia. Stasiun radio sementara ini didirikan terutama untuk berfungsi sebagai media komunikasi dan penyampai informasi kepada rakyat Aceh ketika komunikasi radio dan televisi serta media elektronik lainnya lumpuh pascatsunami. Radio ini juga dipakai oleh Palang Merah Internasional, Palang Merah Indonesia, UNICEF, WHO, MER-C Indonesia, ABC News, majalah Time, serta seluruh organisasi internasional dan lokal untuk menyebarkan berita dan informasi serta untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan media. Radio Suara Aceh dilengkapi dengan peralatan penyiaran yang mampu beroperasi selama 24 jam sehari bila diperlukan. Perlengkapan dan beberapa alat operasional lain disediakan oleh Pemerintah Jepang di bawah *Grassroots Aid Scheme*. Radio Suara Aceh secara resmi mengudara pada 6 Januari 2005 sebagai stasiun radio darurat 24 jam sehari.

Paham akan kebutuhan mendesak terhadap media dan pusat informasi di saat krisis tersebut, pada Februari 2005, Jepang dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) bekerja sama dalam proyek kemanusiaan selama enam bulan untuk menyiarkan informasi kepada para korban tsunami. Untuk proyek ini, Jepang menyumbangkan US\$ 19.058 (Rp.170.855.000) ke PRSSNI buat mendirikan Radio Suara Aceh untuk sementara waktu sebagai pengganti peran stasiun radio yang rusak. Stasiun radio lokal di Aceh juga meminta dimasukkan

sebagai sukarelawan Suara Aceh. Tim ini juga mendapat dukungan dan sumbangan dari Departemen Perhubungan, Departemen Informasi dan Komunikasi di Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, surat kabar Rakyat Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta beberapa organisasi dan stasiun radio lain, seperti stasiun radio dari Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara ikut menyumbangkan tenaga SDM untuk Suara Aceh. Staf dari PRSSNI mengoperasikan stasiun radio yang berlokasi di Banda Aceh ini. Tugas utamanya adalah menyampaikan informasi terbaru kepada publik dan ke stasiun radio lain, seperti tentang pembagian makanan yang dikoordinasi Badan Urusan Logistik (Bulog), bantuan material dari berbagai pihak, dan informasi penting tentang orang hilang.

Aktivitas Radio Suara Aceh terdiri atas beberapa aspek, yaitu Aspek Teknis, Aspek Pendukung, Aspek Komunikasi dan Aspek Selingan atau hiburan. Suara Aceh bertindak sebagai penyampai informasi dan sebagai penerima informasi dari pendengarnya, juga mengumpulkan data dan melakukan survei lapangan untuk dapat mengetahui kebutuhan rakyat dengan lebih baik serta menjalin koordinasi dengan pemerintah lokal, petugas keamanan, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memberikan informasi yang akurat dan terkait dengan pembagian bantuan dan tentang orang hilang untuk disampaikan ke pendengar. Stasiun radio darurat berperan serta dengan mengumpulkan data yang terkait dengan orang hilang dan menjadi sumber acuan bagi Pemerintah Provinsi Aceh, Dirjen Bea dan Cukai Indonesia, perusahaan telekomunikasi Telkom, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bulog, dan banyak lainnya dalam membantu pencarian penyintas.

Radio Suara Aceh merupakan salah satu sumbangan nyata dari Jepang kepada korban tsunami. Sebagai bagian dari perjanjian dengan Pemerintah Jepang, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) bertekad menggunakan peralatan radio untuk tujuan-tujuan darurat di mana saja di Indonesia. Sesudah Suara Aceh ditutup, peralatan radio dikirim ke Yogyakarta. Di kota itu, didirikan media center PRSSNI setelah terjadi gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 2006. Media center ini

berfungsi sebagai koordinator bagi radio-radio darurat di sana untuk menyampaikan berita dan informasi ke masyarakat.

Kemudian, sesaat sesudah tahapan pemulihan tanggap darurat berlalu. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan berbagai dukungan dan bantuan, melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) melihat bahwa rehabilitasi penghidupan secara utuh penting untuk melaksanakan pembangunan berkesinambungan. JICA mengirimkan Misi Perumusan Proyek pada Januari 2005 ke Indonesia sesuai permintaan Pemerintah Jepang, sebagai hasilnya, JICA memutuskan untuk mengimplementasikan “Studi tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mendesak untuk kota Banda Aceh”. Dalam membantu pembangunan masyarakat tahan bencana, Jepang pertamanya mendukung perencanaan tata kota di Banda Aceh melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Darurat Banda Aceh sejak Maret 2005. Membuat sistem saluran air dan tembok pantai direhabilitasi untuk mencegah terjadinya banjir pada waktu air pasang dan hujan besar. Kemudian dalam membantu pembangunan masyarakat tahan bencana, JICA mendukung pembangunan kehidupan tahan bencana di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, tempat kerusakan paling dahsyat terjadi.

Selain itu, Jepang membangun jalur penyelamatan dan gedung evakuasi yang dipakai sebagai pusat pertemuan masyarakat dalam keadaan normal. Pemerintah Jepang mencairkan dana kepada pemerintah Indonesia, melalui bantuan hibah non-proyek, untuk merehabilitasi dan merekonstruksi berbagai sektor yang terkena imbas tsunami di Aceh. Jepang juga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat melalui kegiatan yang kadang merujuk pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, serta memberikan dukungan bagi pelatihan praktik menghadapi bencana.

Sesudah bantuan tanggap darurat selesai diberikan, selanjutnya pihak Jepang dan Indonesia mendiskusikan bagaimana mengalokasikan dana untuk proyek di setiap sektor. Pemerintah Jepang berjanji kepada Pemerintah

Indonesia untuk menyediakan bantuan keuangan sebesar ¥14,6 miliar untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena bencana. Jenis bantuan ini disebut kedalam skema bantuan Hibah Non-Proyek. Pada skema ini, pemerintah Indonesia mengusulkan pemerintah Jepang untuk melaksanakan beberapa proyek. Melalui diskusi dengan instansi terkait dari pemerintah Indonesia dan JICS, ada 5 proyek yang diidentifikasi sebagai proyek dampak cepat (*Quick Impact Projects*) yang membutuhkan bantuan teknis untuk studi atau survey, desain terperinci dan persiapan draft dokumen tender.

Tabel 4.2 Lima Proyek yang diidentifikasi sebagai proyek dampak cepat (QIP)

No	Project Name	Outline of the Project	Amount (Rp)
1	Recovery of water supply system in Banda Aceh city	Rehabilitation of water distribution facilities in Banda Aceh city	44,550,238,600
2	Emergency repair works of Aceh River and floodway	Recovery of water supply system in Banda Aceh city	56,643,883,795
3	Rehabilitation of Lampulo fish market	Rebuilding of ice factory in Lampulo fish market	2,536,072,500
4	Rehabilitation of orphanages (JROH NAGUNA and NIRMALA)	Rehabilitation and rebuilding of NIRMALA and JROH NAGUNA Orphanages	13,840,323,045
5	Supporting for radio and TV stations	Rehabilitation of existing RRI building and provision of equipments for radio station (RRI) and TV station (TVRI)	105,344,550,000

(Sumber: (JICA.FinalReport.1, 2005)

Mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan di berbagai lokasi, perlu ditetapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan perencanaan dan pembentukan program rehabilitasi bencana melalui proyek ini, dengan

penekanan pada efisiensi dan efektivitas. Pada proyek ini perlu ditetapkan fokusnya dan bagaimana mengimbangi yang lainnya untuk memenuhi sebaik-baiknya kebutuhan penerima manfaat dalam keadaan darurat seperti ini. Semua lembaga Jepang terlibat dalam bantuan kemanusiaan ini, Menteri Luar Negeri, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Japan International Cooperation System (JICS)*. Jepang memilih fokus pada kecepatan dan kelayakan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang mulus. *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)* memisahkan fungsi penyediaan *soft loan G to G* dan meleburnya ke dalam organisasi JICA. Peleburan ini bertujuan untuk membuat bantuan dari pemerintah Jepang ke dunia internasional melalui satu pintu sehingga lebih memudahkan dalam pengendalian administrasi dan pengawasannya.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bantuan jangka menengah-panjang bertujuan agar rekonstruksi serta rekonsiliasi berkelanjutan pasca bencana, yang terdiri dari 4 pilar utama seperti “pemulihan layanan sosial”, “pembangunan kembali masyarakat”, “rekonstruksi ekonomi lokal”, dan “tata kelola”. Selain itu, dukungan itu mencakup pengembangan untuk system manajemen bencana dan system peringatan dini tsunami, baik sebagai bantuan jangka pendek maupun menengah-panjang.

Setelah tanggap darurat resmi dinyatakan selesai pada tanggal 26 Maret 2005, adanya masa transisi sekitar 20 hari dan kemudian berdirinya BRR NAD-Nias pada tanggal 16 April 2005 berdasarkan Perpu 2/2005. Ketika Presiden Indonesia akan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa badan baru yang menangani pemulihan Aceh-Nias telah terbentuk yang bernama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Duta Besar dari Jepang yang di undang dalam pertemuan yang di adakan di Bappenas oleh Sri Mulyani menentang jika bentuknya Keputusan Presiden (Keppres). Karena di khawatirkan adalah merebaknya

ketidak pastian atau ketidak percayaan (*distrust*) dari dunia internasional terhadap prospek pemulihan di Aceh-Nias itu. Mendapat reaksi dan tanggapan seperti itu, Sri Mulyani tidak dapat menjawab dan langsung menelepon SBY dan menceritakan situasi ini kepada Presiden SBY dan kemudian SBY menjawab dengan menyetujui bentuknya menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Di masa transisi koordinasi tetap berjalan, dikarenakan masa tanggap darurat selama tiga bulan tersebut relative cukup memulihkan kembali pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski rencana tata kota belum selesai benar, Jepang sudah menawarkan bantuan membangun setidaknya Pasar Aceh, Pasar Peunayong, dan Tempat Pelelangan Ikan Lampulo.

Saat BRR berdiri, Jepang sudah menekan kerjasama dengan kementerian/lembaga (K/L) pusat, sehingga menjadikan Jepang sebagai salah satu dono terbesar melalui Badan Kerja sama Internasional Jepang (*Japan International Cooperation Agency*, JICA). Pemerintah Jepang ingin membangun ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh secara utuh, hal ini tentu saja diliputi oleh maksud tersendiri dimana dibalik bantuan yang ditawarkan, Jepang memiliki kepentingan yang lainnya. BRR, sebaliknya, menawarkan agar Jepang cukup menangani ruas jalan Calang-Meulabo. Tidak puas dengan jawaban seperti itu, Duta Besar Jepang datang untuk membicarakan kembali urusan ini bersama Kepala Badan Pelaksana (Kabapel) BRR yang dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto. Dalam proyek jalan pantai barat ini, pemberi donor (Jepang) menetapkan nilai-nilai bersama dan merumuskan tanggung jawab secara jelas. Akan tetapi, yang juga perlu ditentukan adalah pihak mana yang akan bertanggung jawab dan lokasi tanggung jawabnya, serta spesifikasi dari jalan yang baru melalui koordinasi dengan donor lainnya. Jepang berpendapat bahwa jalan tersebut harus dikembalikan ke kondisi semula, karena ini adalah cara tercepat mengembalikan kehidupan normal masyarakat sehingga dapat memulai kembali aktivitas ekonomi. Sebaliknya, bila kualitas jalan tersebut ditingkatkan dan

luasnya diperlebar, diperlukan lebih banyak dana untuk pengadaan lahan serta waktu untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah. Pengalihan tanah dan kepemilikannya merupakan soal yang sensitif dan dapat berdampak pada masalah hukum, yang pada akhirnya menjadi kendala untuk capaian.

Ada permasalahan yang muncul di sini, sehingga Media massa Jepang Asahi *Shimbun dan Nippon Hoso Kyokai* (NHK, Perusahaan Penyiaran Jepang) pada saat itu datang meliput proses pemulihan di Aceh, terutama yang menyangkut pemanfaatan dana publik Jepang, secara hampir bersamaan. Fokusnya adalah pembangunan ruas jalan pantai barat Aceh karena Jepang memperoleh info bahwa dananya sudah diluncurkan sejak Januari tapi pembangunan belum terlihat berjalan. Tidak lama berselang, berita ini termuat dalam media. Pemerintah Jepang mendapat banyak pertanyaan dari publiknya, terutama dari lembaga legislatifnya. Bahkan satu rombongan legislatif Jepang belakangan sengaja bertamu ke Kantor Badan Pelaksana (Bapel) BRR di Banda Aceh.

Media itu pun meminta konfirmasi, sehingga BRR menjawab bahwa memang ada sedikit kelambanan akibat terganjalnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Padahal sesungguhnya pihak donor bisa dan cukup berurusan dengan BRR sebagai pemegang mandat tunggal dalam menangani persoalan pemulihan. Pada kesempatan itu, BRR menyarankan agar Jepang membuka perwakilan di Banda Aceh sehingga mudah memahami dan menyelesaikan persoalan. *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Japan International Cooperation System* (JICS), dan Kedutaan Besar Jepang akhirnya membuka kantor perwakilannya di Banda Aceh. Pekerjaan pun kontan mengalami kemajuan yang sangat berarti dibanding sebelumnya. Pembukaan perwakilan Jepang di Banda Aceh pun juga sebagai upaya untuk menghindari berbagai macam resiko atau permasalahan. Sesuai dengan rencana Pemerintah Jepang merehabilitasi jalan sepanjang 122 kilometer dan

menyelesaikannya pada Desember 2006, hal ini memperbaiki kondisi jalan.

Pemerintah Jepang mempunyai tipe pembiayaan atau mekanisme penyaluran dana *on-budget/off-treasury*. Anggaran dana yang diberikan oleh Jepang terhadap Indonesia dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengawasan yang ketat. Berikut adalah detail total anggaran yang diberikan Jepang untuk kebutuhan negara.

Table 4.3 Detail total anggaran yang diberikan Jepang yang dialokasikan kepada kebutuhan negara

No.	SEKTOR	PENDANAAN ON BUDGET (Milyar)						PENDANAAN OFF BUDGET (MILYAR)							
		APBN	MDF (US&RP)	ADB	JBIC/ JICA	AFD	IDB	USA	JICS	UNDP/ UNICEF	SINGA-PURA	DUTCH	AUSAID	KOICA	LAIN-LAIN
1	Perhubungan	1.692	406	-	-	-	-	-	-	35	41	84	78	40	46
2	Telekomunikasi	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3	Jalan & Jembatan	4.372	1.470	358	582	-	41	2.489	282	14	-	-	-	-	13
4	Sumber Daya Air	1.471	80	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Energi & Kelistrikan	1.017	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
6	Air minum & Sanitasi	1.403	228	65	345	466	-	241	277	674	-	-	-	4	500
7	Fasilitas Bangunan Umum	979	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
8	Infrastructure Reconstruction Enabling Programme	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan Infrastruktur & Infrastruktur lainnya	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
TOTAL		11.055	20.569	781	927	466	41	2.730	591	723	41	84	78	44	984
		15,839						5,275							
		21,114													

(Sumber: (BRR, 2015))

Total anggaran keseluruhannya mencapai lebih dari Rp 21 triliun Rupiah. Hampir sebesar 90% dari dana tersebut sudah selesai diimplementasikan dalam masa BRR. Sedangkan sisanya seperti MDF, AFD, JICA dan IDB akan dilanjutkan proses implementasinya oleh Kementerian/Lembaga Pusat pada tahun 2009. Bersamaan dengan program tersebut, melalui APBN tahun 2009, Pemerintah juga menyediakan pendanaan sebesar Rp. 1,6 triliun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan

Rp 200 miliar lebih untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bantuan bilateral Jepang ke program pemulihan Aceh-Nias sejumlah ¥14,6 miliar, yang dialokasikan ke dalam proyek yang diatur oleh *Japanese International Cooperation System* (JICS) sebagai badan pelaksana dari *Japanese International Cooperation Agency* (JICA). Proyek yang dilaksanakan termasuk bantuan untuk rehabilitasi ruas jalan, pusat-pusat pelatihan kejuruan, sekolah dan universitas, rehabilitasi kegiatan penangkapan ikan, rekonstruksi rumah yatim piatu, jalan, pasar, klinik kesehatan, obat-obatan, serta pemulihan pengadaan air bersih dan sistem sanitasi. Membangun perumahan dan pemukiman yang didanai dengan pinjaman atau hibah luar negeri melalui program ReKompak yang mencakup pembangunan rumah dan infrastruktur permukiman dilakukan oleh *Japan Fund for Poverty Reduction-Seismically Upgraded housing in aceh Darussalam and north Sumatera*, dan *non Project Type grant aid Jepang* (JICA.FinalReport.1, 2005). Berikut merupakan 13 jenis proyek dibawah *Non-project Type Grant Aid*:

- a. *Emergency Relief Goods*
- b. *Urgent Recovery of the West Coast Road between Banda Aceh and Meulaboh Section*
- c. *Recovery of Water Supply and Sanitation System at Affected Areas in Aceh Province*
- d. *Rebuild or Rehabilitate Health Centers*
- e. *Rehabilitate, Rebuild and Expand the Orphanages for Disaster Orphans*
- f. *Support for Universities*
- g. *Selected Emergency Repair Works of the Floodway Dyke in Banda Aceh*
- h. *Support for Rehabilitation of Fishing Activities*
- i. *Support for Rehabilitation of Local Market Places*
- j. *Support for Vocational Training*
- k. *Support for Madrasah/Pesantren (Islamic school)*
- l. *Support for Radio/TV Broadcasting Activities*
- m. *Procurement of Vacuum Freeze Dry Chamber Ext.*

Berikut detail upaya bantuan penanggulangan bencana di Nanggroe Aceh Darussalam yang diberikan oleh Jepang:

a. Mendukung Perencanaan Tata Kota

Sejak Maret 2005 sampai Maret 2006, JICA membantu Kota Banda Aceh membuat kajian untuk Rencana Segera Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Studi ini mengemukakan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, termasuk jaringan suplai air, sanitasi, saluran air, jalan, dan transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pertimbangan-pertimbangan dampak sosial, serta visi dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi (JICA.FinalReport.1, 2005).

Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Darurat Banda Aceh, Rekonstruksi Meuraxa dimaksudkan sebagai tonggak rekonstruksi di Banda Aceh dengan menunjukkan bagaimana membangun kesiapan masyarakat terhadap bencana berdampak pada aktivitas masyarakat dan ekonomi, yang pada akhirnya membuahkan investasi dan pertumbuhan di daerah itu. Membangun Kembali Prasarana Utama dan Memperbaiki Fasilitas Umum.

Kegiatan rekonstruksi berikut ini dilaksanakan di Meuraxa dengan bantuan Jepang, Kajian Meuraxa termasuk:

- 1) perencanaan zona dan pemakaian tanah
- 2) perencanaan, studi kelayakan, dan desain detail rehabilitasi jalan, termasuk jalur
- 3) penyelamatan (*escape road*) perencanaan, studi kelayakan, serta desain detail sanitasi dan sistem pembuangan
- 4) perencanaan pembangunan gedung evakuasi (*escape building*)
- 5) membangun sistem drainase
- 6) membangun gedung SMP dan SMA
- 7) membangun jalur darurat
- 8) membangun gedung evakuasi masyarakat.

Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerja sama dengan masyarakat setempat yang dipimpin Camat Meuraxa dalam merencanakan tata kota daerah tersebut, termasuk gedung evakuasi dan jalur penyelamatan. JICA dan Camat mengundang masyarakat setempat ke berbagai lokakarya dan pelatihan agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi gedung evakuasi dan jalur penyelamatan yang dipakai bila ada bencana (JICA.FinalReport.2, 2005).

Memperbaiki fasilitas saluran air seperti pompa pengisap dan drainase rusak akibat gempa dan tsunami. Perbaikan fasilitas ini dimaksudkan untuk menaikkan kembali tanah yang anjlok dan melindungi kota dari banjir. Atas permintaan dari administrasi kota, Jepang mendukung rehabilitasi di beberapa zona. Jepang juga membantu rekonstruksi jalan-jalan lokal dan pipa penyaluran air bersih di Meuraxa serta pembangunan SMPN 11 dan SMA 6, yang pelajar-pelajarnya berasal dari dalam dan luar Meuraxa.

b. Dukungan bagi Kegiatan Komunitas untuk Kehidupan yang Lebih Layak

Di samping melakukan pembangunan fisik, Jepang membantu menghidupkan aktivitas komunitas, seperti yang dilakukan melalui proyek Formulasi Jaringan Pemberdayaan Komunitas Mandiri sejak Februari 2007 sampai Maret 2009. Di proyek ini, *Japan International Cooperation Agency (JICA)* memperpanjang kerja sama teknis bersama BRR meluncurkan proyek Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (*Activity for Community Empowerment, ACE*) (JICA.FinalReport.2, 2005). Dalam proyek ini JICA mengutus sebuah tim yang terdiri dari *JICA Expert Team*, yang terdiri atas pakar Jepang dan seorang anggota LSM lokal, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan manajemen bisnis (tata buku dan pemasaran).

Pada dasarnya, ACE adalah komponen utama dari proyek tersebut yang dirumuskan atas pertimbangan untuk:

- 1) Mengubah, secara bertahap, pekerjaan rekonstruksi ke arah kemandirian yang berbasis masyarakat daripada mengusahakan bantuan eksternal.
- 2) Memberikan tanggung jawab kepada warga dan pemerintahan, seperti pembagian biaya, sumbangan tenaga melalui proses partisipasi.
- 3) Mempromosikan sebuah proyek yang berorientasi masyarakat, keuntungan proyek dapat dibagikan secara sama rata ke seluruh warga, ketimbang proyek yang berasal dari atasan untuk bawahannya.
- 4) Menekankan metode dukungan, seperti masukan dari ahli teknik, dari pada menyediakan investasi langsung untuk kegiatan masyarakat dalam rangka menjamin kelangsungan.
- 5) Memperluas pemberdayaan proyek-proyek masyarakat ke bagian lain dari area proyek.

ACE dirancang untuk meningkatkan pendapatan penduduk melalui usaha mikro yang berbasis masyarakat. Selain itu, ACE juga dimaksudkan untuk berkontribusi pada percepatan penyatuan masyarakat yang terpecah-belah pascakonflik dan menguatkan kapasitas untuk menghadapi kemungkinan bencana pada masa mendatang. Tim ahli JICA mengaryakan sejumlah tenaga ahli dari Indonesia untuk bekerja sama dengan tim dan sekaligus bertindak sebagai konsultan. Hal ini ditujukan untuk melakukan alih pengetahuan akan teknologi ACE dari tim ahli JICA kepada para ahli dari Indonesia. Terlebih lagi, tenaga ahli dari Indonesia itu berperan dalam menetapkan tuntutan dan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat untuk memperbaiki mata pencaharian.

Salah satu sasaran program ACE adalah untuk menekankan kembali kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana pada masa datang (JICA.FinalReport.2, 2005). Tim ahli JICA bekerja sama dengan Palang Merah Jepang mengorganisasi Pelatihan Manajemen Bencana di Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh, 24 Agustus 2008, dengan tujuan:

- 1) membentuk satuan tugas (Satgas) organisasi manajemen bencana di setiap desa sasaran
- 2) memfasilitasi kerja sama antar desa
- 3) meningkatkan kesadaran akan manajemen bencana
- 4) menjamin bahwa gedung-gedung dan perlengkapan masyarakat yang disediakan sebagai bantuan dari pemerintah Jepang, dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Program ACE sangat efektif dalam memperbaiki mata pencaharian penduduk di dalam kelompok masyarakat yang telah dibentuk. Program tersebut kemudian menciptakan kelompok masyarakat dan ACE baru atas prakarsa sendiri dan mengalokasikan sebagian dari penghasilannya. Program ACE dilaksanakan selama lebih dari dua tahun dengan kerja sama teknis JICA dan panduan kebijakan BRR. Ia memiliki pendekatan dari bawah ke atas untuk memperbaiki mata pencaharian penduduk dalam tujuh area administratif. Kerja sama teknis dari JICA selesai pada Maret 2009, sehingga semua kegiatan ACE yang ada dipindahkan kepada administrasi daerah.

c. Dukungan pada Pembentukan Masyarakat Sadar Bencana

Untuk memberdayakan masyarakat, diadakan pelatihan praktik penanganan bencana atas kerja sama *Japanese Red Cross Society* (JRCS) dan Palang Merah Indonesia (PMI) pada 28 Agustus 2008 di bawah proyek JICA. Tujuan pelatihan adalah membentuk masyarakat yang tahan bencana serta membuat sistem manajemen bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan jalur darurat bila bencana terjadi, gedung evakuasi masyarakat, dan peralatan untuk keadaan darurat yang disimpan di gedung evakuasi.

Sebelum pelatihan, diadakan lokakarya manajemen bencana selama dua hari di gedung evakuasi. Anggota Satuan Tugas Komunitas untuk Bencana (Satgas) ikut dalam pelatihan manajemen bencana dan belajar menangani situasi dalam bencana. Sesudah

pelatihan, anggota Satgas membagi ilmu dan keahliannya kepada anggota masyarakat yang lain. Melalui pelatihan ini, jaringan masyarakat makin kuat.

Hasil dari dukungan Jepang untuk perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, bibit-bibit masyarakat mandiri mulai tumbuh. Konkretnya, Jepang ikut berperan menyumbangkan rencana segera rehabilitasi dan rekonstruksi serta membangun jalur penyelamatan, gedung evakuasi masyarakat, dan sistem saluran air di Meuraxa. JICA juga berperan dalam membangun masyarakat tahan bencana dengan memberdayakan masyarakat, termasuk aktivitas kelompok untuk menambah penghasilan sehari-hari, serta mengadakan pelatihan praktik penanganan bencana. Melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat ini, organisasi untuk manajemen bencana terbentuk dan kesadaran tentang bencana diperkuat. Lebih lanjut, jaringan dan hubungan antar masyarakat dan antar anggota dipererat.

Sesudah pembangunan gedung untuk evakuasi di Meuraxa selesai, lima bangunan serupa dibangun di daerah lain oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (*Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, TDMRC*) di Meuraxa. Sementara itu, sebagai lanjutan dari pelatihan praktik manajemen bencana, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan pelatihan praktik manajemen bencana tingkat nasional di Meuraxa, yang bertempat di TDMRC. Dikarenakan bencana gempa bumi dan tsunami harus memiliki penanganan bencana yang perlu di pelajari lebih jauh dan mendalam, maka dari itu dibentuknya pusat studi ini. Agar segala informasi terkait bencana ini tidak hilang dan menjadikan dokumentasi yang perlu di kembangkan secara terus menerus. TDMRC dibuat atas ide-ide gagasan oleh Jepang melalui inisiasi akademisi, yaitu beberapa Professor seperti Prof. Tanaka dari Kobe

University dan Prof. Imanura dari Tohoku University dan ada banyak lagi professor-profesor lainnya. Sehingga TDMRC ada di bawah Universitas Syiah Kuala sebagai kontribusi untuk memastikan pesan-pesan dari tsunami 2004 dapat tersebar keseluruh belahan duni terutama negara-negara yang rawan tsunami (JICA.FinalReport.1, 2005). Pemerintah Jepang mendukung berdirinya program studi pasca-sarjana atau Magister Ilmu Kebencanaan di Universitas Syiah Kuala dan pembangunan infrastruktur akademik ini langsung di berikan dana oleh pemerintah Hyogo, Jepang, sehingga gedung Magister Ilmu Kebencanaan ini diberinama Gedung Hyogo. Memiliki tugas khusus dalam kerjasamanya dengan Pemerintah Jepang, yaitu membuat seminar tahun di Jepang dan di Aceh secara bergantian setiap dua tahunnya, melakukan penelitian bersama dan mengirimkan perwakilan ke Jepang maupun sebaliknya. Melalui konferensi internasional yang bernama *Aceh International Workshop and Expo on Sustainable Tsunami Disaster Recovery* (AIWEST-DR) manajemen resiko bencana di kupas lebih konkrit, semacam pertemuan yang membahas tentang tsunami dan workshop. Hal ini terjadi dikarenakan bimbingan yang selalu diberikan oleh Jepang, seperti kolaborasi antara peneliti disana dan di Aceh. Kerjasama antara akademi dan melibatkan juga pemerintah Jepang maupun Aceh, salah satunya JICA dan Pemkot Banda Aceh. Tidak hanya itu saja, ada juga *Area Study* antara Kyoto University dan Universitas Syiah Kuala yang saling share knowledge dan saling membuat workshop dan ex-change student setiap tahunnya.

Tantangan-Tantangan Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ditemukan kesulitan dalam mencari dukungan untuk membangun masyarakat mandiri tahan bencana. Misalnya, pada waktu persiapan pelatihan praktik, beberapa anggota masyarakat ragu-ragu ikut pelatihan dengan sukarela dan mengharapkan pembayaran dari pelatihan tersebut. Pakar Jepang dan

mitra dari Indonesia terpaksa menjelaskan pentingnya pelatihan dan keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh. Kegiatan peningkatan kesadaran seperti ini amat penting untuk kelangsungan proyek. Juga karena dahsyatnya kerusakan, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada sumber daya manusia. Kemampuan meningkatkan kompetensi mitra lokal menjadi tantangan tersendiri. Jepang mengadakan beberapa lokakarya dan pelatihan di kelas dan di lapangan (*on - the - job training*) bersama dengan para pakar dari Jepang.

Mulusnya pelaksanaan proyek hanya mungkin terjadi atas kerja sama antara pakar Jepang yang berpengalaman dan rakyat Aceh, semisal pejabat pemerintah daerah, mitra lokal (LSM), dan anggota masyarakat. Para pakar dari JICA membagi keahlian dan teknologi kepada mitra lokal dengan penuh kesabaran. Dalam proyek ini, Jepang memakai media siaran radio untuk mengirim informasi dan meningkatkan kesadaran, seperti memberikan contoh-contoh tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat serta informasi tentang kesiapan menghadapi bencana. Karakteristik kerja sama JICA tecermin pada kerja sama di Meuraxa dalam merehabilitasi infrastruktur (*hard and soft*) serta menerapkan ide untuk membangun masyarakat mandiri tahan bencana dengan pakar Jepang dan masyarakat lokal. Di negara yang rawan bencana seperti Indonesia, akan sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk menerapkan siaga bencana dan mitigasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bantuan yang diberikan Jepang tidak hanya itu, dalam internasional forum tsunami dan gempa, internasional simposium Januari 2007. Banyak representatif dari berbagai negara yang mendatangi forum internasional tersebut. Termasuk Jepang sebagai negara yang membuat acara serta Indonesia sebagai salah satu pembicara untuk menyapaikan beberapa progress yang telah dikerjakan. Dr. Kusmayanto Kadiman sebagai menteri reseach dan tekhnologi

menjelaskan kemajuan Indonesia pasca tsunami yang terjadi. Salah satu nya yaitu dengan mendirikan badan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias. Selain itu juga telah di buatnya sistem peringatan dini tsunami atau “*Early Warning*” yang dibantu oleh beberapa negara ahli terutama Jepang. Sistem ini sangat berguna bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rawan akan bencana, dengan adanya “*Early Warning*” setidaknya banyak jiwa yang akan terselamatkan. Secara keseluruhan program-program di implementasikan dalam tiga tahapan, yaitu: fase rehabilitasi (2005-2006), tahap rekonstruksi (2007-2009), dan (2010-2015). Tahapan rahabilitasi dan rekonstruksi dianggap sebagai periode restorasi kondisi sosial dan lingkungan pra-bencana, sementara tahapan jangka panjang atau *long-term phase* adalah periode pengembangan untuk mencapai perencanaan kota dengan kesiapan bencana.

Berikut rincian biaya proyek yang di pisahkan berdasarkan rencana dan jadwal pelaksanaan. Dalam implementasinya, biaya tersebut dapat di ubah sesuai permintaan otoritas Indonesia dan pemerintah Aceh. Hal ini dilakukan dengan konsultasi dan bantuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan visi jangka panjang sesuai tujuannya.

Tabel 4.4 Rincian Biaya Proyek di Aceh

SECTOR	Rehabilitation (2005-2007)	Reconstruction (2007-2009)	Long-term (2010-2015)	Total (Rp. Bilion)
A. Housing	780	524.9	588.9	1,893.80
B. Electricity & Communication	651.3	1,281.20	780	2,712.50
C. Water Supply	115.9	8.2	21.7	145.8
D. Drainage and Sanitation	324.2	357.9	176.7	858.8
E. Road and Transport	619.2	154.9	761.2	1,535.30
F. Health	324.6	84.9	88.3	497.8
G. Education	621	323	25	969
H. Disaster Preparedness	25	172.9	321.8	519.7
J. Public Market etc.	112.1	136.5	78	326.6
TOTAL	3,573.30	3,044.40	2,841.60	9,459.30

(Sumber: (JICA.FinalReport.2, 2005))

Dalam perjalanannya kerjasama internasional pemerintah Jepang dan Indonesia tergolong sangat lancar. Berkat dukungan penuh kedua belah pihak dan komunikasi yang baik melalui rapat yang di adakan di Kota Banda Aceh pada 2005 dan diikuti oleh BAPPENAS, PU Jakarta, BRR, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota, Dinas Tata Kota, Walikota Banda Aceh, Dinas PU serta JICA dan JICA *Study Team*. BRR memiliki wewenang untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan memantau kegiatan rehabilitasi termasuk yang didanai langsung oleh donor seperti Jepang. Walikota Banda Aceh bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan proyek sebagai agen pelaksana. Walikota dan BRR berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk

mengelaborasi visi jangka panjang, yang pasti rencana tata ruang dan rencana pengembangan sektor di Banda Aceh menggunakan strategi yang lebih berorientasi pada masyarakat, memperhatikan geografis, kondisi tradisional, budaya dan agama khususnya. Dalam pengadaan proyek JICA berpedoman dengan menyesuaikan pekerjaan dengan ruang lingkup dan ketentuan lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan berlaku di Jepang (JICA.FinalReport.2, 2005).

B. Politik Bantuan Bencana di Aceh oleh Jepang

Bantuan dari pemerintahan Jepang merupakan pola bantuan yang tidak bebas dari syarat-syarat. Dalam proses pemberian bantuan pemerintahan Jepang menginstruksikan dengan landasan nilai, syarat, dan cara yang di inginkan oleh pihak Jepang. Syarat-syarat yang diberikan oleh Jepang yaitu bertujuan untuk mengontrol pihak penerima donor agar dalam tahap eksekusi program-program tersebut sesuai dengan konsep pelaksanaan yang di instruksikan oleh pihak pendonor yaitu Jepang, hal itu pun di konfirmasi secara positif oleh pemerintah Indonesia sebagai pihak penerima bantuan yang sedang berada dalam kondisi kritis dalam aspek penanggulangan bencana, sehingga kondisi tersebut menghendaki pemerintahan Indonesia membutuhkan perhatian dari negara lain. Sikap serta syarat politik Jepang membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi syarat tersebut selama tidak merugikan dan melanggar peraturan Indonesia. Pola pemberian bantuan yang syarat akan unsur politik dilaksanakan dalam dua bentuk. Antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Bantuan.

Dalam sistem ini, Jepang memberikan persyaratan kepada pemerintah Indonesia sebagai syarat agar bantuan dapat di salurkan. Beberapa indikator pun wajib dipenuhi dalam pengembangan dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh Jepang kepada Aceh, Indonesia. Ketika bantuan diberikan, pihak Jepang dan Indonesia mengalokasikan berbagai dana di berbagai sektor dengan

mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan di berbagai lokasi, Jepang menetapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan perencanaan dan pembentukan program rehabilitasi bencana, salah satunya dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan.

- a. Terdapat delapan faktor sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebelum bantuan dialokasikan, yaitu:
 - 1) Efisiensi dan Efektivitas, dalam melakukan perencanaan dan pembentukan rehabilitasi. Jepang mewajibkan Indonesia untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Dengan tujuan pekerjaan tersebut akan di eksekusi dengan tepat, cermat, serta dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - 2) Tanggung jawab, para pekerja rehabilitasi diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai pihak penerima bantuan harus berkompeten dalam peran yang dikerjakan serta menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan serta etos kerja yang disepakati.
 - 3) Profesionalisme, bekerja secara profesional tentu saja sudah menjadi sikap yang melekat pada Jepang. Oleh karena itu dalam penyaluran bantuan pihak Jepang mewajibkan Indonesia untuk bekerja secara profesional dengan bekerja sesuai dengan sistem yang disepakati dan penyeimbangan berdasarkan kredibilitas yang dimiliki oleh pihak Indonesia sesuai regulasi yang disepakati.
 - 4) Daya Saing, faktor keempat yaitu pihak penerima donor memiliki daya saing yang artinya memiliki kapabilitas dalam proses pelaksanaan bantuan yang disalurkan serta memastikan pihak penerima bantuan sanggup untuk merealisasikan program-program yang disepakati, serta terampil untuk melaksanakan proyek kerjasama hingga tuntas.

- 5) Nilai uang, hal tersebut sebagai bentuk pendanaan dalam pelaksanaan program-program yang dialokasikan dalam pembelian bahan-bahan logistik proyek. Oleh karena itu pihak Jepang menginginkan seluruh pembiayaan dapat di distribusikan secara tepat sehingga proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan pembiayaan.
- 6) Kejujuran, dalam bekerja kejujuran merupakan faktor penting yang harus di teladani. Jika Indonesia menginginkan bantuan rehabilitasi dari Jepang berjalan lancar, segala bentuk pekerjaan harus didasari oleh kejujuran agar kedua belah pihak memiliki kepercayaan satu sama lain, sehingga dapat menyelesaikan program-program tersebut dengan tepat guna.
- 7) Transparansi, adalah suatu budaya kerja yang penting dalam membangun kerjasama antara pihak yang berkepentingan didalamnya. Terutama pekerjaan yang melibatkan dua negara. Transparansi yang di standarisasikan oleh Jepang bertujuan agar kedua belah pihak saling terbuka dan percaya. Bukan tanpa alasan, hal tersebut bertujuan guna meminimalisir bentuk kecurigaan serta anggapan negatif dari kedua belah pihak.
- 8) Pendekatan Etis, inti dari pendekatan ini yaitu terdiri dari konsep kewajaran, keadilan dan kenyataan. Jepang dalam hal ini melakukan pendekatan etis kepada Indonesia dengan tujuan proyek bantuan ini dapat dijalankan berdasarkan prinsip baik secara moral dan asas yang berlaku antara kedua belah pihak.

Kedelapan faktor di atas adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam tahapan perencanaan serta pelaksanaan program-program rehabilitasi bencana di Aceh. Jika salah satu tahapan diatas tidak dipenuhi maka Jepang tidak dapat merealisasikan bantuan-bantuan tersebut. Syarat dan ketentuan tersebut lahir bukan tanpa sebab, kedelapan faktor itu muncul karena dipicu oleh masalah pembuatan jalan

pantai barat di Aceh, adanya keterlambatan serta masalah dalam pertanggung jawaban akhirnya keluarlah pertimbangan yang harus dipenuhi sebagai syarat agar proyek dapat kembali berjalan dengan lancar. Proyek ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang baik dan pertimbangan yang tepat dari delapan faktor di atas memang perlu untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan dana yang terbatas. Melalui aktifitas ini, diketahui bahwa pendekatan yang komprehensif untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup ketahanan terhadap bencana, sangatlah efektif dalam menghidupkan kegiatan masyarakat. Kedelapan faktor ini adalah contoh dari bentuk politik bencana yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Kedelapan syarat tersebut wajib dipenuhi jika ingin bantuan barang dan jasa dari Jepang teralokasikan dengan baik.

Dalam konteks bantuan luar negeri yang di inisiasikan oleh Jepang terdapat *self interest* yang dimana hal tersebut dilihat sebagai bentuk promosi *disaster management* oleh Jepang dalam hal penanggulangan bencana alam di negara lain. Bukan hanya sebagai wadah untuk mempromosikan program pemerintahan untuk kepentingannya di dunia internasional namun hal ini sekaligus menjadi faktor yang memperkuat asumsi dunia internasional bahwa Jepang memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana alam di ranah internasional. Hal tersebut terealisasikan ketika Pemerintahan Indonesia masih mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan tersebut secara positif dan di nilai sebagai hal yang wajar dalam konteks *foreign aid policy*. Kesepakatan yang dijalin kedua belah pihak disinyalir sebagai bentuk penguatan kerjasama kedua belah pihak agar tercapainya hal-hal yang substansial baik secara terstruktur maupun sistematis.

- b. Pembiayaan atau mekanisme penyaluran dana yang ditentukan Jepang.

Dalam penyaluran dana bantuan pihak Jepang memiliki cara tersendiri. Bantuan tersebut jauh dari mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia, ketentuan yang dilakukan Jepang tidak bisa diganggu gugat

oleh pemerintah Indonesia karena mau tidak mau pihak Indonesia pun membutuhkan dana tersebut. Pemerintah Jepang adalah pendonor yang memilih modalitas *on-budget/off-treasury* yang memiliki kelebihan bahwa donor (Jepang) mempunyai kemampuan sendiri untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sebagai upaya agar tidak memberatkan pemerintah mitra (Indonesia) dikarenakan limitasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang sumber dayanya pada umumnya terbatas serta tersebar di sektor-sektor dan daerah-daerah yang tertimpa bencana. Kekurangan modalitas ini adalah pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam soal alokasi dana atau pekerjaan proyek. Lembaga-lembaga Jepang datang dengan pemahaman sendiri tentang jenis proyek yang akan didanainya dan bagaimana proyek ini harus dikerjakan. Karena terbiasa bekerja dengan pemerintah, Jepang lebih suka pencairan dana bantuan dilakukan di luar Bendahara Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) khusus. Dengan mekanisme ini, dana pada mulanya tidak disahkan di dalam dokumen anggaran. Penyaluran dilakukan langsung dari rekening pemerintah pendonor ke rekening pemerintah Indonesia, yaitu pada bank yang ditunjuk, dan dari sana pembayaran akan dikucurkan ke badan pelaksana. Setelah pengadaan barang atau jasa dilakukan, dana yang dicairkan dibuatkan pengesahan anggaran melalui daftar isian proyek anggaran (DIPA).

c. Penekanan Power oleh Jepang

Selain barang, jasa, nilai dan norma dalam memberikan bantuan, Jepang menunjukkan besarnya pengaruh (*influency*) di Aceh, Indonesia. Dimulai dari dibentuknya badan baru yang menangani pemulihan Aceh-Nias bernama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Intervensi tersebut dapat dilihat ketika Duta Besar dari Jepang menolak untuk menyepakati keputusan Presiden (Keppres), hal tersebut diutarakan bukan tanpa alasan

melainkan karena pihak Jepang khawatir bantuan tersebut dapat di politisir oleh oleh elit-elit di Indonesia yang cenderung menghambat penyaluran bantuan sehingga berakibat merebaknya ketidak pastian atau ketidak percayaan (*distrust*) dari dunia internasional terhadap prospek pemulihan di Aceh-Nias. Atas desakkan dari Duta Besar Jepang akhirnya Sri Mulyani sebagai delegasi melakukan koordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu juga mebuahkan hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden RI. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Jepang memiliki power yang besar terhadap pemerintahan Indonesia sehingga ketentuan yang diinginkan Jepang terpenuhi.

Contoh yang kedua yaitu dibentuknya kantor perwakilannya di Banda Aceh. Dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Japan International Cooperation System (JICS)*, dan Kedutaan Besar Jepang Sementara. Hal ini di latar belakang oleh masalah pendanaan proyek pembuatan jalan, hal tersebut terjadi karena lemahnya koordinasi antara BRR dengan Pemerintah Pusat di Jakarta yang mengakibatkan lambannya proses revitaliasi saat itu. Oleh karena itu, BRR yang mendapatkan mandat langsung dari Presiden RI sebagai perpanjangan tangan pihak Indonesia di Aceh, hingga akhirnya BRR meminta Jepang yang sekaligus bersifat sebagai observer meletakkan perwakilannya untuk meninjau langsung dan melihat pembangunan berjalan sesuai dengan konsep yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut dinilai sebagai tindakan politis yang secara tidak langsung disisipkan kepada Aceh agar pada akhirnya mengandung nilai serta prinsip dari Jepang. Terdapat nilai, budaya, serta norma yang dipengaruhi oleh Jepang dalam memberikan bantuan. Dalam kasus ini pihak Jepang melibatkan Menteri Luar Negeri, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Japan International Cooperation System (JICS)*. Nilai-nilai yang diberikan Jepang pun akhirnya di adopsi oleh pemerintah Indonesia. Selama pemerintah

Indonesia melengkapinya dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Jepang, akses kepada bantuan pun akan diberikan se-transparan mungkin. Sedangkan disisi lain, karena Indonesia membutuhkan bantuan Jepang maka pada akhirnya pemerintah Indonesia menyesuaikan diri selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah Indonesia.

2. Politik Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana

Tentu saja adanya politik yang disisipkan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana oleh Jepang yang tidak hanya semata-mata memberikan bantuan. Salah satunya yaitu bagaimana dalam menyalurkan bantuan, Jepang memiliki power terhadap pemerintah Indonesia, dan bagaimana ketika memberikan bantuan, Jepang mewajibkan untuk menggunakan peralatan logistik serta tenaga ahli dari Jepang pula. Hal itu semata-mata Jepang lakukan karena ingin memberikan “*impact*” atau pengaruh untuk masyarakat di Indonesia khususnya Aceh. Salah satu politik pelaksanaan yang dilakukan Jepang dalam program penanggulangan bencana di Aceh yaitu:

a. Tenaga Ahli diwajibkan dari Jepang

Dalam menyalurkan bantuan, Jepang memiliki syarat dan ketentuan untuk menggunakan tenaga ahli yang bersumber dari Jepang. Tidak hanya tenaga ahli dalam bantuan fisik, tenaga ahli dalam bantuan kemanusiaan pun dikirim oleh Jepang. Tenaga ahli yang dikirimkan Jepang bertugas mengajari serta mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan seluruh rencana sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Salah satu contohnya yaitu, Ketika memberikan bantuan dari awal tanggap darurat, hingga melakukan proyek serta rekonstruksi. Salah satu contohnya yaitu ketika memberikan bantuan medis untuk tanggap darurat, seluruh bantuan seperti tenaga medis dan bahan logistik keperluan medis di *import* dari Jepang. Pada aksi cepat tanggap, pemerintahan Jepang mengirimkan Tim Medis Darurat gelombang pertama yang terdiri dari 4 dokter dan 7 orang perawat beserta obat-obatan medis. Obat-obatan tersebut diklasifikasikan tidak tersedia di

Indonesia dan tentunya belum disertifikasi oleh BPOM. Walaupun hal tersebut diluar dari regulasi yang wajar, namun pemerintahan Indonesia mengkompromi tindakan tersebut karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk menerapkan regulasi yang ketat dikarenakan kondisi saat itu cukup mendesak.

Selain bantuan medis, dalam melaksanakan berbagai proyek rekonstruksi, Jepang pun menerjunkan setidaknya tenaga ahli untuk membuat rencana pembangunan sesuai konsep revitalisasi ala Jepang. Hal ini juga karena seluruh bentuk bantuan yang diberikan berasal dari Jepang yang memungkinkan regulasi-regulasi tersebut harus berdasarkan ketentuan pihak pendonor. Dalam pelaksanaannya proyek-proyek tersebut dapat diisi oleh pekerja dari Indonesia dengan syarat pembangunan dilaksanakan tidak bertolak belakang dengan konsep yang ketentuan pemerintahan Jepang.

Di samping melakukan pembangunan fisik, Jepang membantu menghidupkan aktivitas komunitas, seperti yang dilakukan melalui proyek *Community Empowerment Program (CEP)* atau *Activity for Community (ACE)* yang mana mengajarkan tentang mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan perekonomian sosialnya, yang meliputi peralatan (*tools*), lembaga (*institutions*), sumberdaya manusia yang mampu menciptakan barang dan jasa. Hal ini termasuk ke dalam Ekonomi Politik Kontemporer yang mengacu pada manajemen persoalan ekonomi suatu negara, yang mengaitkan hubungan antara tujuan negara (*public ends*) dengan kepentingan pribadi (*private interests*), dalam kaitannya Jepang sangat jelas memberikan hal baru terkait pengetahuan negaranya tentang Ekonomi-Politik Baru. Tenaga ahli juga diluncurkan dari Jepang yang berasal dari JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang diprogramkan untuk membangun kerjasama dengan pemerintahan Indonesia. Selain itu juga tim ahli JICA bekerja sama dengan Palang Merah Jepang untuk mengorganisir

Pelatihan Manajemen Bencana di Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh. Serta Tim teknis dari Jepang diberangkatkan untuk menangani aspek teknis stasiun radio yang berada di Aceh sebagai bentuk alat komunikasi.

Dengan menggunakan tenaga ahli yang disediakan oleh Jepang, secara tidak langsung Indonesia menjadi ketergantungan oleh bantuan yang diberikan. Hingga beberapa tahun berikutnya pun tenaga ahli dari Jepang masih dibutuhkan disana. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi Jepang karena dapat mendukung peningkatan ekonomi di negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Jepang dalam menyerahkan tenaga ahli mereka merupakan salah satu dari motif ekonomi politik yang dimiliki Jepang.

b. Rekonstruksi oleh Jepang

Jepang memberikan dana yang banyak kepada Indonesia untuk dialokasikan kepada beberapa bentuk bantuan. Salah satunya yaitu untuk kebutuhan rekonstruksi bangunan. Tidak hanya membangun kembali daerah pengungsian sementara bagi warga Aceh, namun fasilitas umum pun diberikan oleh Jepang seperti sekolah, rumah sakit, perbaikan jembatan yang rusak, jalur keselamatan dan gedung evakuasi serta masih banyak lagi. Namun tenaga ahli pembangunan tersebut tidak berasal dari pihak Indonesia oleh karena itu seluruh proyek yang diprogramkan tetap berada di bawah pengawasan Jepang. Lembaga-lembaga Jepang yang bergabung dalam penanggulangan membawa konsep tersendiri tentang pelaksanaan proyek yang akan didanainya dan bagaimana proyek ini harus dikerjakan, karena Jepang memiliki preferensi sendiri dalam pembangunan. Hal tersebut bisa terlihat dari bentuk arsitektur bangunan yang di konsepkan oleh pemerintah Jepang agar proyek pembangunan tersebut sesuai dengan konstruksi standart rencana pembangunan dari pihak pendonor. Tidak hanya bentuk arsitektur namun alat-alat dalam proses pembangunan sebagian besar di

distribusikan dari Jepang. Contohnya yaitu saat aksi tanggap darurat, Jepang menyediakan 3 kapal serta *hovercraft*, 5 helikopter dan 2 pesawat C-130H, jasa angkut udara ini membawa barang dan peralatan yang diperlukan seperti tenda, pembangkit tenaga listrik (*generator*), selimut, tikar tidur, penjernih air, tangki dan jerigen air minum untuk mendukung tindakan pencegahan medis/epidemic di Aceh.

Selain itu perlengkapan dan beberapa alat operasional untuk menghidupkan radio untuk kepentingan komunikasi pun telah disediakan oleh Pemerintah Jepang di bawah *Grassroots Aid Scheme*. Pembuatan Radio komunikasi telah di perintahkan Jepang sejak proses tanggap darurat di Aceh, demi melancarkan komunikasi antara satu dengan lainnya. Komunikasi adalah salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan apabila berada di situasi bencana maupun saat situasi darurat. Jepang menganggap bahwa potensi bencana akan terus terjadi oleh karena itu penguatan informasi dapat mengkoordinir masyarakat pada situasi darurat, yaitu dengan membuat sistem informasi yang terintegrasi. Kualitas alat komunikasi merupakan hal yang vital bagi penanggulangan bencana, oleh karena itu pihak Jepang mempromosikan penggunaan radio sebagai alat yang efektif untuk berkomunikasi pada saat kondisi darurat. Dalam proses rekonstruksi, Jepang bersikeras untuk membuat beberapa fasilitas seperti radio, jalan serta jembatan. Solusi-solusi baru yang diberikan oleh Jepang pada dasarnya merupakan hal yang sederhana namun hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan hal tersebut tidak pernah menjadi opsi oleh Negara lain bahkan BRR sekalipun dalam hal peningkatan kualitas komunikasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas ini pihak Jepang menggunakan *source* yang telah di investasikan ke Indonesia sebelumnya, bahwa pihak yang memberikan donasi dan biaya maka dari itu biaya tersebut harus

dialokasikan untuk membuat fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan konsep Jepang.

Barang-barang yang di distribusikan dalam proses tanggap darurat hingga rekonstruksi tidak semata-mata diberikan oleh Jepang, dibalik pemberian tersebut tentu saja terdapat motif politik ekonomi yang dimiliki mereka. Setelah pemberian bantuan pasca-bencana, alat-alat yang disebutkan sebelumnya seperti radio dan barang lainnya sengaja diberikan oleh Indonesia dengan tujuan agar tahun kedepannya Indonesia kembali mengajukan permintaan untuk membeli barang-barang itu, sehingga pada akhirnya Jepang mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil politik ekonomi yang di lakukannya.

Tabel 4.5 Kerangka proyek penanggulangan bencana di Aceh

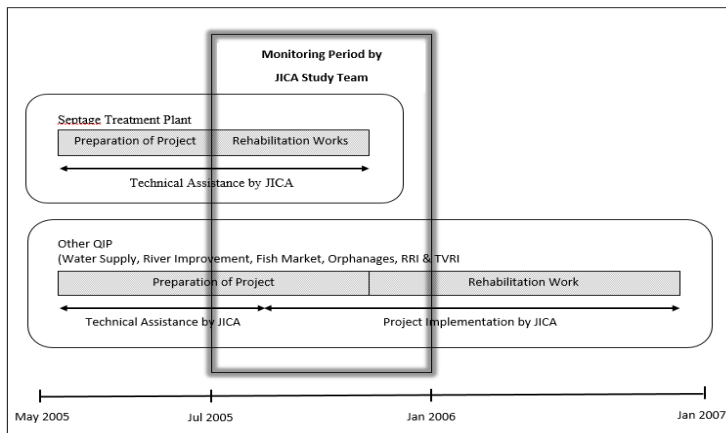
No	Project Title	Framework of the Project			
		Project Purpose	Japanese Side	Indonesia Side	Implementing Agent
1	Supporting for Radio and TV stations	Useful Public information is disseminated through RRI and TVRI	<ul style="list-style-type: none"> •Consultan (facility planner, architect, design engineers, broadcasting, equipment specialist, cost estimate/procurement expert, construction management expert) •Cost on rehabilitation works 	<ul style="list-style-type: none"> •Counterparts (project manager, assistant engineers) 	JICS
2	Rehabilitation of Lampulo Fish Market	Safety of seafood unloaded to Lampulo Fish Market is enhanced	<ul style="list-style-type: none"> •Consultant (facility planner, design engineers, cost estimate/tender expert, construction management expert) •Cost on rehabilitation works 	<ul style="list-style-type: none"> •Counterparts (project manager, assistant engineers) 	JICS
3	Recovery of Water Supply System in Banda Aceh City	Restoring water distribution network in Banda Aceh City to the pre-disaster situation	<ul style="list-style-type: none"> •Consultant (water supply planner, design engineers, cost estimate/procurement expert, construction management expert) 	<ul style="list-style-type: none"> •Counterparts (project manager, assistant engineers) 	JICS

No	Project Title	Framework of the Project			
		Project Purpose	Japanese Side	Indonesia Side	Implementing Agent
			<ul style="list-style-type: none"> •Cost on procurement and installation works 		
4	Rehabilitation of Orphanages (Jroh Naguna and Nirmala)	<ul style="list-style-type: none"> •Safety for orphans living and studying in these facilities is ensured •Capacity of the facilities is increased to meet the increased demand after the disaster 	<ul style="list-style-type: none"> •Consultant (facility planner, design engineers, cost estimate/tender expert, construction management expert) •Cost on rehabilitation works 	<ul style="list-style-type: none"> •Counterparts (project manager, assistant engineers) 	JICS
5	Rehabilitation of Septage Treatment Plant	Contribute to improve sanitary condition of Banda Aceh City and mitigate negative environmental impact caused by septage disposed	<ul style="list-style-type: none"> •Consultant (facility planner, design engineers, cost estimate/tender expert, construction supervisor, project monitoring expert) •Cost on STP rehabilitation works 	<ul style="list-style-type: none"> •Counterparts (project manager, facility O&M staffs, administrative supporting staffs) 	Banda Aceh Municipality, Sanitation and Park Department

(Sumber: (JICA.FinalReport.2, 2005))

Tabel 4.5 menjelaskan tentang proyek rehabilitasi yang diadakan oleh Jepang di Indonesia seperti pembuatan radio dan pembenahan persediaan air, seluruh nya berada di bawah kuasa Jepang hal ini membuktikan bahwa bantuan penanggulangan bencana yang di berikan oleh Jepang tidak di salurkan secara mentah begitu saja, akan tetapi Jepang juga menginstruksikan seluruh bantuan yang diberikan ke Indonesia. Pada proses penanggulangan bencana dan rekonstruksi, peran Jepang lebih dominan dibandingkan Indonesia, yaitu dengan lebih banyak mengontrol jalannya proyek dari awal hingga akhir agar berjalan sesuai syarat dan instuksi yang Jepang terapkan. Melalui JICS, Jepang memiliki kedudukan sebagai konsultan, sehingga seluruh dana dan program yang ada di pantau oleh Jepang sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa Jepang memiliki '*power*' dalam pemberian bantuan penanggulangan bencana di Aceh. Politik bantuan bencana pun sengaja di lakukan oleh Jepang dan secara tidak langsung memberikan keuntungan yang berkelanjutan kepada Jepang. Jepang sengaja membuat pemerintah Indonesia agar menjadi ketergantungan terhadap pertolongan yang Jepang berikan. Hingga pada akhirnya meskipun proses rehabilitasi telah usai, Indonesia masih tetap membutuhkan pertolongan dari Jepang baik berupa barang, jasa maupun tenaga ahli yang bersumber dari Jepang. Ketergantungan tersebut membawa keuntungan ekonomi bagi Jepang sendiri.



Gambar 3 Monitoring Period by JICA Study Team
(Sumber: (JICA.FinalReport.2, 2005))

Gambar di atas menjelaskan bahwa selain memberikan bantuan kebencanaan kepada Indonesia, Jepang juga memonitor atau memantau jalannya pekerjaan agar sesuai dengan target yang mereka inginkan. Japan International Cooperation Agency atau JICA sebagai team yang bertanggung jawab saat itu memantau jalan kerjanya proses rehabilitasi yang dilaksanakan di Indonesia agar tetap sesuai dengan “Scope of Works” atau lingkup pekerjaan yang ada. Sedangkan proyek rehabilitasi yang dikerjakan atau Quick Impact Project (QIP) itu sendiri meliputi pembuatan pasar ikan, memperbaiki sungai yang ada, mengembangkan persediaan air proyek lainnya. Dengan menggunakan power yang mereka punya, Jepang mendesak Indonesia agar bala bantuan yang mereka berikan sesuai dengan target. Dengan hal itu, Indonesia pun tidak mempunyai pilihan lain selama proyek yang dilakukan tidak merugikan dan masih sesuai dengan prosedur yang ada.